

PERAN KOMITE DALAM MENGONTROL PENGGUNAAN DANA BOS PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT DASAR DI KABUPATEN SUMBAWA

Ade Safitri, Ilham Handika, Abdul Rahim

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samawa

Pos-e: adesafitri88@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui peran Komite Dalam Mengontrol Penggunaan Dana BOS Pada Satuan Pendidikan Tingkat Dasar Di Kabupaten Sumbawa dengan metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang terkumpul kemudian Analisis menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil yang diperoleh yakni: 1) Peran komite sekolah di Sekolah Dasar sebagai pemberi pertimbangan (*advisory*) dalam tata kelola pendidikan berbasis sekolah cenderung berperan tinggi; 2) Peran komite sekolah sebagai pendukung (*supporting*) dalam tata kelola pendidikan berbasis sekolah cenderung berperan tinggi; 3) Peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling*) dalam dalam tata kelola pendidikan berbasis sekolah cenderung berperan rendah; 4) Peran komite sekolah sebagai penghubung (*mediator*) dalam dalam tata kelola pendidikan berbasis sekolah cenderung berperan tinggi

Kata kunci: Peran Komite, Dana Bos, Satuan Pendidikan Tingkat Dasar

PENDAHULUAN

Untuk terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV pasal 10-11 menetapkan bahwa: Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi serta wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan

yang layak, seperti termaktub dalam UUD 1945. Menyadari hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan bagi peningkatan kualitas pendidikan, termasuk dalam hal penyempurnaan sistem pendidikan. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan pergeseran paradigma pengelolaan sistem pendidikan dari sentralistik ke arah desentralistik yang kemudian dikenal dengan istilah otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan rumah tangganya (pemerintahannya) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan era otonomi daerah ini adalah dengan diterapkannya konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS adalah pengelolaan

yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah. MBS merupakan salah satu manajemen pendidikan yang berbasis pada kemandirian sekolah dan aparat daerah dalam menentukan arah, kebijakan, serta jalannya pendidikan di daerah masing-masing. Selain itu implementasi MBS mengandung misi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat luas selain orangtua siswa dalam mewujudkan pendidikan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi nyata dari seluruh perangkat yang ada dalam konsep MBS sesuai dengan karakteristik sekolah yang bersangkutan.

Mengingat pentingnya partisipasi seluruh warga sekolah dan masyarakat dalam memajukan pendidikan di sekolah, maka sebagai konsekuensi dalam mengakomodasi aspirasi, harapan, dan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap sekolah maka perlu adanya suatu wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah dewan pendidikan di tingkat kabupaten dan komite sekolah di tingkat sekolah. Komite Sekolah merupakan bentuk partisipasi masyarakat luas yang terdiri dari unsur-unsur orangtua siswa, wakil siswa, wakil guru, kepala sekolah, wakil tokoh masyarakat setempat (ulama, budayawan, pemuka adat dan cendikia pemerhati pendidikan, wakil masyarakat terinstitusi (lurah, camat dan pejabat lainnya yang ada di wilayah

sekolah), dan ulama, pejabat pendidikan (Dinas Pendidikan).

Komite Sekolah berkedudukan di setiap satuan pendidikan, merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarki dengan lembaga pemerintah. Tujuan komite sekolah adalah (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Hasbullah, 2006).

Ada empat peran utama komite sekolah (1) memberikan pertimbangan (*advisory agency*), (2) memberikan dukungan (*supporting agency*), (3) mengawasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah (*controlling agency*), dan (4) penghubung antara sekolah dengan orang tua siswa (*mediator*). Untuk menjalankan perannya, komite sekolah memiliki fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, bertugas mendorong orang tua dan masyarakat agar berpartisipasi dalam pendidikan serta menggalang atau menggali potensi-potensi dana masyarakat untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Secara kelembagaan, komite sekolah langsung dapat diawasi oleh masyarakat (Kurniawan, I., 2006).

Sinergi antara komite sekolah dan sekolah menyebabkan tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat

sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya. Melalui komite sekolah, masyarakat atau orang tua murid sebagai penyumbang dana pendidikan di satuan pendidikan berhak menuntut sekolah apabila pelayanan dari sekolah tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Disamping itu masyarakat melalui komite sekolah berhak mengetahui berbagai kucuran dana yang mengalir ke sekolah (Ali Hanapiah Muhi, 2012).

Salah satu indikator kinerja komite sekolah yaitu memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), memberikan pertimbangan perubahan dan ikut mengesahkan RKAS bersama kepala sekolah. Tentu saja RKAS tidak boleh menyimpang dari RPS atau rencana strategis, karena keberadaan RKAS berfungsi mencapai tujuan-tujuan yang sebelumnya terangkum dalam tujuan besar Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan secara rinci untuk satu tahun anggaran (Rahmania Utari, 2012).

Memberdayakan dewan pendidikan dan komite sekolah mungkin menjadi suatu alternatif dalam melakukan kontrol. Keterlibatan komite sekolah bisa diawali dari penyusunan RKAS. Keterlibatan komite sekolah mulai dari proses awal ini memungkinkan komite sekolah melakukan kontrol. Kontrol dari internal sekolah sulit diharapkan karena guru-guru dan siswa tidak mengetahui informasi yang lengkap tentang proyek di sekolahnya. Ketertutupan pengelolaan dana di tingkat sekolah dilakukan oleh kepala sekolah

sehingga guru dan siswa tidak bisa melakukan kontrol terhadap pengelolaan dana proyek tersebut. Kondisi ini memerlukan keterlibatan dan kontrol dari masyarakat. Hal ini penting untuk menghindari penyelewengan dan memenuhi aspek transparansi dalam pengelolaan pendidikan dan dana pendidikan. Selama ini keterlibatan masyarakat selalu diartikan menarik dana dari masyarakat untuk pendidikan, terutama sekolah. Setelah itu masyarakat hampir tidak pernah diberi tahu bagaimana dan untuk apa penggunaan dana tersebut (Ali Hanapiah Muhi, 2012). Oleh karena itu, peran Komite Sekolah sebagai wakil dari masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan termasuk pengelolaan dana pendidikan menjadi sangat penting.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena dalam penelitian ini akan menghasilkan data kuantitatif sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian deskriptif yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Berikut ini tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti : 1). Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh melalui hasil kuisioner atau angket., 2) Rumus untuk menghitung persentase responden, penulis menggunakan rumus seperti yang

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi yang sedang
dicari persentasenya

N = Jumlah seluruh
responden

Untuk interpretasi terhadap jawaban kuisioner digunakan ketentuan sebagai berikut, 1) Responden yang memilih selalu dalam menjawab pertanyaan pada angket dimaknai sangat tinggi perannya, hal ini didasarkan pada intensitas responden yang selalu berpartisipasi pada suatu kegiatan yang berkaitan dengan perannya. Responden yang memilih sering dalam menjawab pertanyaan pada angket dimaknai tinggi perannya, hal ini didasarkan pada intensitas responden yang memberikan banyak waktu, akan tetapi tidak selalu berpartisipasi pada suatu kegiatan yang berkaitan dengan perannya. Responden yang memilih kadang-kadang dalam menjawab pertanyaan pada angket dimaknai rendah perannya, hal ini didasarkan pada intensitas responden yang meluangkan sedikit waktunya atau pasif dalam berpartisipasi pada suatu kegiatan yang berkaitan dengan perannya. Responden yang memilih tidak pernah dalam menjawab pertanyaan pada angket dimaknai sangat rendah perannya, hal ini didasarkan pada intensitas responden yang tidak pernah berpartisipasi pada suatu kegiatan yang berkaitan dengan perannya., 2) Persentase responden dikategorikan berdasarkan skala kategori persentase yang diungkapkan Koentjaraningrat yang dikutip Sugiharti (2011: 32), sebagai berikut.

Tabel 1. Skala Kategori Persentase Responden

0%	Tidak satupun
1% - 25%	Sebagian Kecil
26% - 49%	Hampir Seluruhnya
50%	Seluruhnya
51% - 75%	Sebagian Besar
76% - 99%	Hampir Seluruhnya
100%	Seluruhnya

Interpretasi data dilakukan dengan mengkonversi hasil pengumpulan data di lapangan sebagai berikut.

Tabel 2. Interpretasi data

Selalu	Sangat Tinggi
Sering	Tinggi
Kadang-kadang	Rendah
Tidak Pernah	Sangat rendah

Untuk mengetahui tingkat penerapan manajemen pola MBS menggunakan rumus persentase yaitu :

$$\text{Persentase penerapan MBS} = \frac{\text{jumlah komponen MBS}}{\text{jumlah seluruh responden}} \times 100$$

Observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil pengumpulan data kemudian di analisis menggunakan Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011: 244).

Data yang digunakan untuk mengetahui variabel peran komite sekolah pada penelitian ini diperoleh melalui instrumen yang berupa angket, jumlah butir angket adalah 22 butir untuk Komite Sekolah dan 20 butir untuk kepala sekolah dan guru.

Setiap peran komite sekolah dalam penelitian ini diungkap melalui indikator yaitu perencanaan program sekolah, pelaksanaan program sekolah, pertanggungjawaban program sekolah. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory*) hanya dikhususnya pada perencanaan program sekolah dengan 8 butir soal. Peran komite sekolah sebagai pendukung (*supporting*) dikhususkan pada pelaksanaan program sekolah dengan 5 butir soal. Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol (*controlling*) dikhususkan pada pertanggungjawaban sekolah dengan 5 soal. Peran komite sekolah sebagai penghubung (*mediator*) dalam berbagai permasalahan yang dihadapi sekolah terdiri dari 4 soal. Dalam kaitan ini pembahasan hasil penelitian antara masing-masing tingkatan (SD dan SMP) dipisahkan.

1. Peran Komite Sekolah di Tingkat Sekolah Dasar

Dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu di tingkat sekolah dasar, maka penyelenggara pendidikan dituntut untuk mampu bekerja pada jaringan. Yaitu kerjasama dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan berbagai sumber kekuatan dan peluang pendidikan. Karena tidak ada suatu kekuatan pun yang mampu berdiri sendiri tanpa kerjasama dengan yang lain. Jadi penyelenggara pendidikan harus mampu menjalin

kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan orang tua, masyarakat maupun dengan lembaga-lembaga pemerintah. Salah satunya adalah menjalin kerja sama dengan komite sekolah. Komite memiliki peran sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*), sebagai badan pendukung (*supporting agency*), sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan, serta penghubung (*mediator agency*), antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Untuk mengukur peran tersebut, maka melalui tingkat partisipasi komite sekolah. Partisipasi komite sekolah merupakan partisipasi dalam hubungan sekolah dengan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, dimana turut sertanya individu atau kelompok masyarakat dalam pengembangan sekolah (Rahmat, 2009:81). Selanjutnya partisipasi komite sekolah adalah suatu perwujudan perilaku masyarakat yang positif dalam suatu rangkaian kerjasama atau keterlibatan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang dimaksud dengan keterlibatan di sini bahwa masyarakat ikut serta secara langsung, baik secara fisik maupun melalui konsentrasi uang, barang, sumbangan pikiran sekaligus ikut serta mengelola dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil hubungan sekolah dengan masyarakat yang dicapainya.

Partisipasi masyarakat sebagai kekuatan kontrol dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah menjadi sangat penting. Dibidang pendidikan partisipasi ini lebih strategis lagi. Sebab, partisipasi tersebut bisa menjadi semacam kekuatan kontrol bagi pelaksanaan dan

Apalagi saat ini Depdiknas mulai menerapkan konsep manajemen berbasis sekolah. Karena itulah gagasan tentang perlunya komite sekolah yang berperan sebagai lembaga yang menjadi mitra sekolah yang menyalurkan partisipasi masyarakat menjadi kebutuhan yang sangat nyata dan tidak terhindarkan. Dengan adanya komite sekolah, kepala sekolah dan para penyelenggara serta pelaksana pendidikan di sekolah secara substansial akan bertanggung jawab kepada komite sekolah tersebut.

Komite sekolah bertujuan membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam upaya memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional. Untuk mencapaitujuan-tujuan tersebut tentu saja komite sekolah mesti melakukan berbagai upaya dalam mendayagunakan kemampuan yang ada pada orang tua dan masyarakat, serta lingkungan sekitarnya, termasuk LSM–LSM yang memiliki perhatian khusus dibidang pendidikan

(Rahmat,2009:91). Komite sekolah juga dapat memberikan masukan penilaian untuk pengembangan pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan manajemen sekolah. Komite sekolah bisa juga memberikan masukan bagi pembahasan atas usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Oleh karena itu partisipasi komite sekolah dapat dikatakan sebagai suatu proses penyaluran aspirasi masyarakat baik yang bersifat dukungan material maupun non material dari seluruh anggota dan kepengurusannya, baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, pelaksanaan, serta pengawasan/pengevaluasian pendidikan demi kemajuan mutu sekolah.

Berikut ini disajikan data empirik peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*) dalam perencanaan sekolah, Sebagai Pendukung dalam Pelaksanaan program sekolah, sebagai pengontrol dan sebagai penghubung atau mediator.

Tabel 3. Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan Dalam Perencanaan Sekolah di Sekolah Dasar (SD)

NO SOAL	ASPEK	SL		SR		KK		TP	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Perumusan/revisi visi, misi dan tujuan sekolah	1	11,11	5	55,55	1	11,11	2	22,22
2	Penyusunan RAPBS/RKAS	2	22,22	6	66,66	1	11,11	-	
3	Penetapan kriteria kinerja sekolah	-		4	44,44	5	55,55	-	
4	Penetapan kriteria tenaga kependidikan	-		1	11,11	6	66,66	2	22,22
5	Petetapan kriteria fasilitas pendidikan/sarana dan prasarana	-		1	11,11	6	66,66	2	22,22
6	Penetapan kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain	1	11,11	8	88,88	-		-	

7	Kebijakan dan program pendidikan	-		6	66,66	3	33,33	-	
8	Peningkatan kemampuan personil tenaga kependidikan	-		2	22,22	6	66,66	1	11,11
JUMLAH RATA-RATA			5,55		45,82		38,88		9,72

Tabel di atas menunjukkan peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan pada Perencanaan sekolah diperoleh persentase 5,55 % selalu, 45,82 % sering, 38,88 % kadang-kadang, dan 9,72 % tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai hampir separuh komite sekolah mengaku berperan tinggi dan hampir separuh lainnya menyatakan berperan rendah. Sedangkan komite sekolah yang berperan sangat rendah, dan sangat tinggi masing-masing dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Table 4. Peran Komite Sekolah Sebagai Sebagai Pengontrol dalam dalam pelaksanaan tata kelola pendidikan di Sekolah Dasar

NO SOAL	ASPEK	SL		SR		KK		TP	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Terlibat dalam pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan	1	11,11	2	22,22	5	55,55	1	11,11
2	Meminta penjelasan sekolah tentang hasil belajar siswa	1	11,11	2	22,22	3	33,33	3	33,33
3	Membahas Laporan Pertanggung Jawaban RAPBS dalam rapat internal Komite Sekolah	3	33,33	1	11,11	5	55,55	-	-
4	Meminta klarifikasi/ penjelasan atas laporan pertanggungjawaban RAPBS	1	11,11	2	22,22	3	33,33	3	33,33
5	Meminta agar informasi RAPBS dipasang di papan pengumuman sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.	4	44,44	3	33,33	2	22,22	-	-
JUMLAH RATA- RATA			22,22		22,22		40,01		15,55

Keterangan : **SL**=Selalu, **SR**=Sering, **KK**=Kadang-kadang, **TP**=Tidak Pernah

Tabel di atas menunjukkan peran Komite Sekolah sebagai pemberi dukungan pada pelaksanaan program sekolah diperoleh persentase 26,66 % selalu, 33,33 % sering, 28,88 % kadang-kadang, dan 11,11

% tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai hampir separuh komite sekolah berperan sangat tinggi, tinggi dan rendah. Sedangkan sebagian kecil komite sekolah berperan sangat rendah. Hal ini menunjukkan pada pelaksanaan program sekolah, sebagian besar komite

Table 5 Peran Komite Sekolah Sebagai Mediator di Sekolah Dasar

NO SOAL	ASPEK	SL		SR		KK		TP	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat atas kinerja sekolah	4	44,44	5	55,55	-		-	
2	Melakukan kordinasi dan konsultasi dengan Dewan pendidikan Kabupaten dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan	-		2	22,22	5	55,55	2	22,22
3	Berkordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait dengan permasalahan yang dihadapi sekolah	-		5	55,55	2	22,22	2	22,22
4	Ikut terlibat sebagai mediator dalam penyelesaian masalah yang dihadapi sekolah dengan pihak eksternal	3	33,33	6	66,66	-		-	
JUMLAH RATA- RATA			19,44		50,00		19,44		11,11

Keterangan : **SL**=Selalu, **SR**=Sering, **KK**=Kadang-kadang, **TP**=Tidak Pernah
Tabel di atas menunjukkan peran Komite Sekolah sebagai pemberi dukungan pada pelaksanaan program sekolah diperoleh persentase 22,22 % selalu, 22,22 % sering, 40,01 % kadang-kadang, dan 15,55 % tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai hampir separuh komite sekolah berperan rendah. Sedangkan komite sekolah yang berperan

sangat tinggi, tinggi dan sangat rendah, dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Hal ini menunjukkan pada pelaksanaan fungsi kontrol, sebagian besar komite sekolah berperan rendah. Berikut ini disajikan data empirik peran komite sekolah sebagai mediator

Tabel Rekapitulasi Tingkat Partisipasi Komite Sekolah Pada Sekolah Dasar Dalam Tata Kelola Pendidikan Berbasis Sekolah Di Kabupaten Sumbawa

INDIKATOR	INTENSITAS			
	SL	SR	KK	TP
	%	%	%	%
Pemberi pertimbangan	5,55	45,82	38,88	9,72
Pemberi dukungan	26,66	33,33	28,88	11,11

Pengontrol	22,22	22,22	40,00	15,55
Mediator	19,44	50,00	19,44	11,11
Jumlah Rata-Rata	18,46	37,84	31,88	11,87

Tabel di atas menunjukkan peran Komite Sekolah sebagai pemberi dukungan pada pelaksanaan program sekolah diperoleh persentase 19,44 % selalu, 50,00 % sering, 19,44 % kadang-kadang, dan 11,11 % tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai separuh komite sekolah berperan tinggi. Sedangkan komite sekolah yang berperan sangat rendah, rendah dan sangat tinggi masing-masing dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Hal ini menunjukkan separuh komite sekolah berperan tinggi sebagai mediator.

Dari rekapitulasi di atas jelaslah diketahui bahwa komite sekolah di tingkat satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) hampir separuh berperan tinggi dan hampir separuh berperan rendah. Sedangkan Komite Sekolah yang berperan sangat tinggi dan sangat rendah hanya dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

2. Tingkat Penerapan Manajemen Pola MBS

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan, yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan Nasional. MBS merupakan suatu penawaran bagi sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didik.

Sri Hendrawati (2013), menyebutkan, indikator keberhasilan MBS sangat ditentukan oleh (1) Efektifitas proses pembelajaran (2) Kepemimpinan sekolah yang kuat (3) Pengelolaan tenaga

kependidikan yang efektif (4) Sekolah memiliki budaya mutu (5) Sekolah memiliki tim work yang kompak, serdas dan dinamis : merupakan karakteristik yang dituntut oleh MBS karena out pun merupakan hasil kolektif warga sekolah bukan hasil individual. (6) Sekolah memiliki kemandirian artinya harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas sehingga memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang tidak selalu menggantungkan diri pada atasan. (7) Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat. (8) Transparansi dalam pengambilan keputusan, pengelolaan dana melibatkan pihak lain sebagai fungsi control. (9) Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. (10) Sekolah memiliki akuntabilitas yaitu bentuk pertanggung jawaban yang harus dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan, misalnya berbentuk laporan prestasi baik kepada pemerintah maupun kepada orang tua peserta didik. (11) Out put adalah prestasi sekolah (baik prestasi akademis maupun non akademik).

Dalam penelitian ini, penerapan MBS dilihat dapat dilihat berdasarkan pengetahuan kepala sekolah dan guru terhadap MBS, penilaian keadaan sekolah secara menyeluruh atau self assessment, pentapan criteria kinerja sekolah, criteria kerjasama sekolah dengan pihak lain, criteria tenaga kependidikan, criteria sarana dan prasarana. Selain itu juga dilihat dari partisipasi komite sekolah dalam penyusunan RAPBS, perumusan visi misi dan tujuan sekolah, pentapan

kebijakan dan program sekolah, evaluasi dan monitoring serta akuntabilitas.

Dari hasil survey diketahui penerapan MBS di satuan pendidikan SD dan SMP sebesar 93%. Angka ini diperoleh berdasarkan skor dari 13 variabel MBS yaitu Sekolah menerapkan manajemen pola MBS, Pengetahuan tentang manajemen pola MBS, Pelaksanaan self Assesment, Penetapan criteria kinerja sekolah, Penetapan criteria kerjasama sekolah dengan pihak lain, Penetapan criteria tenaga kependidikan, Penetapan criteria fasilitas/sarpras, Pelibatan komite sekolah dalam perumusan visi, misi dan tujuan sekolah, Pelibatan komite sekolah dalam penyusunan RAPBS, Pelibatan KS dalam penetapan kebijakan dan program sekolah lainnya, Pelibatan KS dalam evaluasi, monitoring program pendidikan, Memberikan laporan pertanggungjawaban RAPBS kepada komite sekolah, mengumumkan informasi RAPBS secara terbuka.

ini hanya mencakup manajemen sarana pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan:

Peran komite sekolah di Sekolah Dasar sebagai pemberi pertimbangan (*advisory*) dalam tata kelola pendidikan berbasis sekolah cenderung berperan tinggi, yang ditunjukkan sebanyak 37,84 % (hamper separuh) komite sekolah berperan tinggi, 18,46 % (sebagian kecil) komite sekolah berperan sangat tinggi, sedangkan yang berperan rendah 31,88 % (sebagian kecil) dan sisanya berperan sangat rendah yaitu 11,87% (sebagian kecil).

Peran komite sekolah sebagai pendukung (*supporting*) dalam tata

kelola pendidikan berbasis sekolah cenderung berperan tinggi, yang ditunjukkan sebanyak 33,33% (hamper separuh) komite sekolah berperan tinggi, 22,66% (sebagian kecil) komite sekolah berperan sangat tinggi, sedangkan yang berperan rendah 28,88% (hamper separuh) dan 11,11 % yang berperan sangat rendah

Peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling*) dalam tata kelola pendidikan berbasis sekolah cenderung berperan rendah, yang ditunjukkan sebanyak 40% (separuh) komite sekolah berperan rendah, masing-masing 22,22 % (sebagian kecil) komite sekolah berperan sangat tinggi dan tinggi sedangkan yang berperan sangat rendah 15,55 (sebagian kecil).

Peran komite sekolah sebagai penghubung (*mediator*) dalam tata kelola pendidikan berbasis sekolah cenderung berperan tinggi, yang ditunjukkan sebanyak 50,0% (sebagian besar) komite sekolah berperan tinggi, 19,44 % komite sekolah berperan sangat tinggi (sebagian kecil), sedangkan yang berperan rendah 19,44 % (sebagian kecil) dan 11,11% yang berperan sangat rendah.

SARAN

saran yang dapat diberikan : 1) Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, badan control dan sebagai penghubung, harus dapat meningkatkan perannya pada seluruh tahapan kegiatan sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan (monitoring dan evaluasi) hingga out put program; 2) Sekolah hendaknya dapat mengoptimalkan pemberdayaan komite sekolah, dengan memposisikan komite sekolah sebagai mitra, sehingga sekolah dapat

memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat guna mendukung proses pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmat. 2009. *Public Relations For School*. Bandung: MQS Publishing
- Ali Hanapiah Muhi. (2012). *Eksistensi Komite Sekolah*. <http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2012/01/KOMITE-SEKOLAH.pdf>. 1 Agustus 2012.
- Arief Furchan. (2004). *Penelitian dan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Budi Wiyono,, 2007, *Metodelogi Penelitian (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Action Research)*, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Hasbullah. (2006). *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- http://www.pikiran_rakyat.com/cetak/2006/012006/27/99_forumguru.htm.16 Oktober 2006.
- Kurniawan, I. (2006). *Optimalisasi Komite Sekolah*.
- Manasse Mallo, dkk, 1986, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, Penerbit Karunia Utama.
- Mohammad Syaifuddin, dkk. (2007). *Bahan Ajar Cetak Manajemen Berbasis Sekolah*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Mulyasa. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nana Syaodih Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Nanang Fattah. (2003). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Nurkholis. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Siskandar. (2008). *Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No. 073, Tahun ke-14, Juli 2008.
- Sri Renani Pantjastuti, dkk. (2008). *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya diMasa Depan*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.